

EVALUASI PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN JARINGAN TRAYEK DI WILAYAH KOTA JEMBER

Afra Luthfiana 1610511018 Putri Robiatul A S. Sos, M. Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan peraturan bupati nomor 13 tahun 2013 tentang penyesuaian jaringan trayek di wilayah kota jember. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari Bidang Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Pengumpulan data melalui wawancara observasi dan dokumentasi. Dalam mengevaluasi kebijakan Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember seperti yang tercantum dalam Peraturan bupati telah memuat aspek: (1) efektifitas, bahwa, adanya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah memuat aspek efektif, karena mampu memberikan kontribusi besar manfaat dan solusi untuk memecahkan masalah di dalam Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember. (2) efisien, penyesuaian jaringan trayek sudah efisien dalam penerapannya. Dana angkutan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dialokasikan pada gaji supir angkutan umum mikrolet lin beserta pemenuhan fasilitas sarana prasarana. (3) kecukupan, Penyesuaian jaringan trayek sudah cukup bagus dan memadai walaupun masih ada kendala-kendala di dalam pelaksanaannya. (4) responsivitas, Penyesuaian jaringan trayek mendapat respon yang baik Kebijakan ini dapat dikatakan berhasil, karena bisa diterima di lingkungan masyarakat serta memberikan kontribusi yang besar bagi pihak-pihak terkait seperti masyarakat, supir angkutan umum dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. (5) perataan, Penyesuaian jaringan trayek di Kabupaten Jember merata. Hal tersebut dikatakan merata dilihat dari manfaat yang diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat maupun pemerintah daerah. (6) ketepatan, Penyesuaian jaringan trayek ini sudah tepat, karena pemerintah sudah menentukan lokasi yang tepat dan merancanganya dengan baik, agar ketidaksesuaian jalur angkutan umum satu berkurang.

Kata kunci: Evaluasi Penyesuaian Jaringan Trayek

ABSTRACT

Transportation in Jember Regency. Date collection through observation and documentation interviews. In evaluating the Adjustment of Route Network policy in the Jember City Region as stated in the Regulations of the regent it has included aspects: (1) effectiveness, that, the existence of Regents Regulation No. 13 of 2013 concerning Adjustment of the Route Network in the Jember City Region in the Jember District Transportation Office has contained aspects effective, because it is able to contribute greatly to the benefits and solutions for solving problems in the Adjustment of Route Networks in the Jember City Region. (2) efficient, route network adjustments are already efficient in their application. Public transport funds at the Department of Transportation of Jember Regency are allocated to the salaries of microbus public transportation drivers and the fulfillment of infrastructure facilities. (3) adequacy, Adjustment of the route network is quite good and adequate even though there are still obstacles in its implementation. (4) responsiveness, Adjustment of the route network gets a good response This policy can be said to be successful, because it can be accepted in the community and provides a large contribution to related parties such as the public, public transportation drivers and the Department of Transportation of Jember Regency. (5) leveling, Adjustment of route networks in Jember Regency is evenly distributed. This is said to be evenly seen from the benefits provided to various levels of society and local government. (6) accuracy, Adjustment of this route network is appropriate, because the government has determined the right location and designed it well, so that the mismatch of one public transport line is reduced. City people use private vehicles to travel in certain areas so that it can cause transportation problems on the route.

Keyword: Trayek Network Adjustment

1.PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk yang meningkat disertai adanya peningkatan kondisi sosial ekonomi sehingga berdampak terhadap meningkatnya migrasi penduduk dari desa ke kota. Hal tersebut membutuhkan penambahan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan kehidupan serta sistem kebutuhan lainnya seperti alat perhubungan (alat transportasi). Alat transportasi digunakan untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan manusia. Perkembangan sarana transportasi berdasarkan pada penemuan –penemuan teknologi baru, sangat berguna dan bisa digunakan. Namun pencapaian sasaran pembangunan telah menimbulkan permasalahan di bidang transportasi di perkotaan. Sistem transportasi publik merupakan salah satu untuk menjawab masalah- masalah transportasi di daerah-daerah perkotaan.

Perkembangan transportasi publik di Indonesia yang lambat, memberi banyak hambatan pada masyarakat, sehingga tidak memilih transportasi publik pada pilihan pertama untuk bepergian. Masalah-masalah transportasi tersebut harus ditangani, dengan upaya penyedia transportasi menentukan prioritas dari kualitas pelayanan transportasi publik yang sudah ada. Penentuan prioritas sebaiknya diselaikan terlebih dahulu untuk menentukan kualitas pelayanan yang paling berpengaruh. Penentuan prioritas merupakan hal yang penting, karena kemampuan pemerintah untuk mengembangkan transportasi umum yang dibatasi oleh keterbatasan waktu, uang, dan sumber daya manusia. Pengukuran tingkatan pelayanan yang ditawarkan, merupakan hal yang sangat penting dalam mengidentifikasi aspek pelayanan yang potensial beserta kelemahannya, apabila dibandingkan dengan modal transportasi lainnya.

Jember merupakan kota berkembang, yang memiliki banyak sekali potensi ekonomi, mulai dari pendidikan, niaga, dan wisata. Besarnya potensi ekonomi tersebut, kurang diimbangi dengan pelayanan sistem transportasi yang memadai, karena kinerja

angkutan umum perkotaan Jember yang cenderung menurun. Menurunnya kinerja angkutan umum perkotaan Jember tidak terlepas dari faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti, kondisi kurang nyaman dari segi pelayanan, mobil angkutan umum yang sudah berumur tua dan belum dilakukan perbaikan jaringan trayek oleh pihak berwenang, dan banyak terjadi penyimpangan angkutan umum. Faktor-faktor tersebut diatasi dengan memberi pelayanan yang baik seperti sistem transportasi. Sistem transportasi kota merupakan komponen peranya sangat signifikan, karena kondisi sistem angkutan umum yang buruk akan menyebabkan turunya efektifitas dan efisiensi angkutan umum itu sendiri. Sampai saat ini terdapat lebih dari 100 (seratus) trayek angkutan dalam kota yang melintasi sebagian besar wilayah Kota Jember. Kota Jember memiliki 4 terminal trayek yang masih beroperasi, dan semua jalur tersebut sudah sesuai. Namun terdapat terminal yang dibekukan salah satunya yaitu terminal Ajung karena melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan angkutan umum tidak melewati area tersebut. Terminal-terminal yang masih aktif dalam jaringan trayek antara lain: Tawang alun, Ajung, Pakusari dan Arjasa. Pemerintah Kabupaten Jember berusaha mewujudkan pelayanan penyedia fasilitas sarana dan prasarana transportasi angkutan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Dinas Perhubungan menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat melalui pelayanan transportasi yang aman, cepat, murah dan nyaman. Angkutan umum di Kabupaten Jember bersifat massal, sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan angkutan umum, menyebabkan biaya penumpang ditekan serendah mungkin. Pemerintah Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum baik dengan jumlah penumpang banyak atau sedikit.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berupaya menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa orang dan atau barang dalam

wilayah sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan penataan jaringan trayek angkutan umum perkotaan Jember sangat penting, untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas pengguna angkutan umum. Tinjauan serta pengawasan terhadap jaringan trayek perlu dilakukan agar dapat diidentifikasi permasalahannya khususnya pada angkutan perkotaan. Hal tersebut tentunya menjadi harapan masyarakat agar setiap kegiatan transportasi terlayani secara maksimal di wilayah perkotaan Jember. Masyarakat kota menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan pada daerah-daerah tertentu sehingga dapat menimbulkan masalah transportasi pada trayek. Salah satu cara menurunkan tingkat pengguna kendaraan pribadi yaitu dengan meningkatkan sistem pelayanan angkutan umum, sehingga pemakai kendaraan pribadi berkenan menggunakan jasa angkutan umum kota. Pada kegiatan optimalisasi, fungsi sarana dan prasarana transportasi harus memiliki tingkat manfaat yang baik bagi seluruh jaringan jalan, sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum. Namun, penyesuaian diperlukan oleh jaringan trayek di kawasan pusat kegiatan yang berada dalam

II. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian dalam sebuah penelitian menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena nantinya sangat mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Unit Angkutan Umum dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan, lebih mengetahui dan memahami data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu tentang Penyesuaian jaringan trayek beserta kinerjanya. Waktu penelitian dimulai dari Bulan November 2019 – Desember 2019.

Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah di kemukakan, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu, penelitian deskriptif kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

wilayah kota Kabupaten Jember. Pelayanan jasa angkutan penumpang umum seharusnya

lebih berkualitas dan merata terhadap trayek, dan perlu mengatur dan menetapkan Penyesuaian Jaringan Trayek di Kabupaten Jember. Apakah Kebijakan Penyesuaian Jaringan Trayek di Kabupaten Jember telah tepat guna dan mampu memecahkan masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Penyesuaian jaringan trayek di Kabupaten Jember. Bagaimana Evaluasi Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Evaluasi Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember?

Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti adalah mengevaluasi kebijakan Peraturan Bupati Jember nomor 13 tahun 2013 tentang Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember.

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik mendeskripsikan bahasa dan kata-kata konteks yang khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna (perseptif objek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Pada fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait pelaksanaan Evaluasi Peraturan Bupati nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember. Pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan fenomena tersebut adalah studi kasus yang mana hanya berlaku untuk kasus tersebut, tidak berlaku untuk kasus lainnya.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hal ini

dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Didalam wawancara terdapat suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Pada wawancara terbuka informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial

2. Observasi
Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan. Pada hal ini pengamatan terhadap perilaku penerbitan perijinan serta perilaku masyarakat yang sedang mengurus izin lokasi.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode Penentuan Informan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan memilih orang yang dianggap paling tahu (representatif) tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 adalah tentang Kedudukan,

tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan petugas dari bidang Angkutan Umum dengan Program Penyesuaian Jaringan Trayek di Kabupaten Jember.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat.

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Dinas Perhubungan adalah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan

bidang Unit Pelaksana Teknis, tugas Melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Evaluasi Peraturan Bupati nomor 13 Tahun

2013 Tentang Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember

Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 Tentang Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember diberlakukan sejak tahun 2013 hingga saat ini. Kebijakan Bupati tersebut merupakan bentuk peran pemerintah sebagai pelayanan publik yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak setiap warga masyarakat demi kenyamanan dan kesejahteraan. Fokus peneliti tentang kebijakan penyesuaian jaringan trayek yang diterapkan di Kabupaten Jember. Bidang Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang memiliki tugas dan fungsi menangani permasalahan-permasalahan tersebut.

Sarana prasarana merupakan salah satu aspek penting penunjang sistem transportasi suatu Kota/Kabupaten. Sarana transportasi ini menyangkut moda angkutan umum yang dibuat sesuai rute jaringan wilayah bagian kota Kabupaten Jember. Kondisi saat ini wilayah perkotaan Kabupaten Jember dilayani oleh beberapa angkutan umum, yaitu dalam trayek maupun luar trayek. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 37 ayat 1, yang menjelaskan bahwa angkutan trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal. Sedangkan pengertian tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan yang tidak teratur. Angkutan perkotaan merupakan transportasi yang digunakan dari satu tempat ke tempat lain, dalam suatu daerah kota berupa mobil pribadi, bus antar kota, angkutan umum yang

terikat dalam trayek. Angkutan umum di wilayah Kabupaten Jember terdiri dari Angkutan Antar Kota (AAK), Antar Provinsi (AKAP).

Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan hasil yang dicapai suatu organisasi atau lembaga tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan penyesuaian jaringan trayek di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memiliki beberapa tujuan terkait keefektifitasan jaringan trayek di Kabupaten Jember yang harus diwujudkan. Apabila pencapaian tujuan – tujuan Dinas Perhubungan tersebut terkait jaringan trayek besar, maka semakin besar pula hasil serta keefektifitasannya. Maka kebijakan penyesuaian trayek memiliki dampak besar pula bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Jember.

Sebenarnya jaringan trayek berjalan dengan baik, tetapi setelah ada laporan adanya supir non izin, sistem menjadi terhambat. Terdapat trayek J yang bergesekan samping dengan ojek pangkalan, akhirnya angkutan pada daerah tersebut tidak beroperasi. Pihak Dinas Perhubungan juga belum pernah merevisi jaringan trayek berdasarkan Peraturan Bupati. Hal tersebut juga karena Pemerintah Kabupaten tidak pernah menyesuaikan. Selain itu, masyarakat sekarang juga banyak memiliki kendaraan bermotor, yang pada akhirnya membuat perminataan angkutan umum di Kabupaten Jember berkurang. Adanya permasalahan tersebut pada akhirnya menjadikan angkutan umum mikrolet lin tidak beroperasi kembali, sehingga sistem jaringan trayek yang telah dibuat tidak sesuai penerapan dilapangan. Beberapa permasalahan yang diketahui tersebut harusnya mendapat solusi dari Dinas maupun Pemerintah Daerah, namun sesuai data wawancara diatas yang bersangkutan tidak pernah merevisi bahkan menyesuaikan jaringan trayek tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian jaringan trayek di Kabupaten Jember tidak dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan Pertauran Bupati yang ada dengan bukti tidak adanya revisi kebijakan serta penyesuaiannya.

Efisiensi

Efisiensi merupakan kesesuaian antara sasaran/target yang ditetapkan dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum, sehingga suatu tujuan akan tercapai. Berdasarkan wawancara dengan upaya Dinas dalam peningkatan SDM supir angkutan umum, sehingga sesuai dengan harapan dan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Pengawasan sangat diperlukan dalam kegiatan ini, agar sesuai dengan jaringan trayek. Pengawasan dilakukan setiap bulan sekali kepada supir angkutan. Adanya kegiatan pengawasan pada masing-masing terminal tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan supir angkutan umum mikrolet lin. Beberapa data wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sesuai dengan kebutuhan dan upaya peningkatan SDM supir angkutan juga dilakukan sebagai usaha penyesuaian jaringan trayek yang sebelumnya tidak efektif.

Kecukupan

Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas, dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Untuk penyesuaian jaringan trayek di Kabupaten Jember cukup bagus dan memadai dalam hal pelaksanaannya, walaupun terkadang masih ada saja hambatan atau kendala didalamnya. Hambatan-hambatan yang dimaksud itu berasal dari supir angkutan non izin itu sendiri dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut cukup menjelaskan

bahwa kesalahan-kesalahan banyak dilakukan oleh supir non izin, yang menyebabkan jaringan trayek terhambat. Adanya pengawasan sebulan sekali yang dilakukan oleh Tim Pengawasan kurang efektif, sehingga Bidang Angkutan Umum menyarankan untuk melakukan pengawasan gerilya. Beberapa permasalahan diatas tentunya ada sisi positif yang didapatkan dengan adanya kebijakan penyesuaian jaringan trayek ini, seperti para supir angkutan mikrolet lin mendapatkan gaji dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Selain itu, para supir juga mendapatkannya dari penumpang yang nantinya sebagian pendapatannya disetorkan pada koperasi masing-masing terminal. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 terkait penyesuaian jaringan trayek yang di terapkan di Kabupaten Jember memberikan kelebihan dan kekurangan baik bagi supir angkutan maupun masyarakat. Kelebihan yang dirasakan masyarakat ialah menggunakan fasilitas umum daerah dengan harga murah. Hal tersebut disesuaikan dengan ekonomi masyarakat daerah Kabupaten Jember.

Perataan

Sebuah kebijakan dapat dikatakan efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya yang digunakan serta manfaatnya merata. Hal tersebut perlu dilakukan, karena pelayanan publik merupakan upaya birokrasi pemerintah daerah untuk memenuhi kebuthan dan kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan tersebut dapat menghasilkan jasa publik, sehingga akan sangat bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

“Untuk jaringan trayek di Kabupaten Jember sudah merata di empat terminal yaitu Pakusari, Arjasa, Ajung dan Tawang Alun. Terdapat supir angkutan yang beroperasi di masing-masing terminal.

Adanya angkutan umum yang beroperasi di setiap terminal memudahkan masyarakat untuk sampai ketempat tujuannya, karena pada terminal-terminal sudah dipredikisi akan banyak penumpang yang lalu lalang”.

Hal tersebut dikatakan merata dilihat dari manfaat yang diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat maupun pemerintah daerah. Masyarakat selaku penumpang yang memanfaatkan fasilitas angkutan umum, terpenuhi kebutuhan dan kegiatannya. Bagi supir angkutan umum

kebijakan ini juga memberikan efek positif, terutama dalam hal penghasilan ekonomi yang bisa didapatkan harian maupun bulanan. Selain itu, Dinas Perhubungan juga mendapatkan ciptaan keuntungan adanya kesesuaian jaringan trayek di Kabupaten Jember. Keempat Terminal yang aktif beroperasi, merupakan fasilitas dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan hal tersebut juga berjalan dengan baik.

Responsivitas

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat dalam menanggapi pelaksanaan suatu kebijakan setelah mempertimbangkan pengaruh yang akan ditimbulkan. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan ini sudah mulai terlihat, karena dampaknya sudah dapat dirasakan. Kebijakan ini lebih banyak menghasilkan dampak positif berupa dukungan masyarakat dan berbagai pihak terkait. Namun, juga terdapat efek negatif karena beberapa

kesalahan pihak-pihak terkait seperti supir mikrolet lin yang menjalankan angkutan umum tidak sesuai jaringan trayek. Hal tersebut berupa protes masyarakat selaku penumpang angkutan umum yang disampaikan pada Tim Pengawas. Responsivitas dalam kebijakan publik ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat, terkait aktifitas penerapan peraturan yang berlaku pada daerah Kabupaten Jember tentang penyesuaian jaringan trayek. Oleh karena itu, respon atau tanggapan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperbaiki

“Sudah ada respon terkait kebijakan ini dari pelaksana untuk pelayanan penyesuaian jaringan trayek. Respon yang diberikan positif, karena dalam pelaksanaannya semua pihak turut andil dalam menyukseskan kebijakan Bupati ini. Selain itu, pelayanan publik berupa angkutan umum mikrolet lin ini, sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jember”.

Responsivitas oleh berbagai pihak diatas menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat diterima di kalangan masyarakat, meski terdapat kendala pada saat penerapannya. Namun, dengan adanya evaluasi yang dilakukan sebulan sekali oleh Tim Pengawas, kendala tersebut dapat diatasi. Respon masyarakat adalah hal yang sangat penting, karena kegiatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki kebijakan yang telah diterapkan, layak diterapkan kembali atau tidak. Kebijakan ini dapat dikatakan berhasil, karena bisa diterima di lingkungan masyarakat, serta memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pihak-pihak terkait seperti masyarakat, supir angkutan

umum, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya bila ada, misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif. Pada kondisi tersebut dimungkinkan terdapat alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan, sehingga bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

“Penyesuaian jaringan trayek ini sudah tepat, karena pemerintah sudah menentukan lokasi yang tepat dan merencananya dengan baik, agar ketidaksesuaian jalur angkutan umum satu berkurang. Berdasarkan pantauan Dinas Perhubungan, lintasan jalur yang dilewati setiap angkutan umum berdasarkan tipe A, B, C, D, karena masing-masing tipe angkutan umum tersebut berbeda jalur. Sejauh ini pihak kami selalu melakukan pengawasan dan sudah lebih baik juga, khususnya sesuai dengan Perbub Nomor 13 Tahun 2013”.

Sesuai wawancara tersebut cukup menjelaskan bahwa penerapan kebijakan penyesuaian jaringan trayek berjalan dengan baik, meski terdapat kendala-kendala di lapangan. Tim pengawas memberikan laporan terkait kegiatan pengawasan yang dilakukan pada supir angkutan umum mikrolet lin yang ada di masing-masing terminal di Kabupaten Jember, agar tetap bekerja sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Beberapa hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kebijakan penyesuaian jaringan trayek ini cukup efektif dan efisien diterapkan di Kabupaten Jember. Pengalokasian angkutan umum mikrolet lin dan Tim Pengawas juga baik, sehingga sesuai dengan rancangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Jember. Selain itu, adanya pengawasan bulanan oleh tim pengawas, evaluasi kepada supir angkutan umum mikrolet lin selalu dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya, agar tidak diulangi kembali. Oleh karena itu, kebijakan program ini sangat penting mengingat pengaruh yang dimiliki oleh suatu peraturan terhadap proses penerapan program yang dijalankan.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diperoleh kesimpulan umum bahwa Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Jaringan Trayek Di Wilayah Kota Jember Di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah memuat aspek efektif, efisien, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Adapun hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Efektifitas. Bahwa, adanya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah memuat aspek efektif, karena mampu memberikan kontribusi besar manfaat dan solusi untuk memecahkan masalah di dalam Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember. Adapun terkait

pelaksanaanya juga sudah efektif, dari segi prosedur dan sumber daya manusia sudah dikatakan baik. Hal itu terlihat pada setiap pelaksanaanya setelah adanya perbub jaringan trayek angkutan umum beroperasi melalui jalur sesuai masing-masing.

Efisiensi. penyesuaian jaringan trayek sudah efisien dalam penerapanya. Dana angkutan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dialokasikan pada gaji supir angkutan umum mikrolet lin beserta pemenuhan fasilitas sarana prasarana. Pemenuhan sarana prasarana tersebut dilakukan untuk menarik penumpang agar berminat menggunakan jasa angkutan umum. Pengalokasian dana hingga saat ini sesuai dengan kebutuhan khususnya terkait angkutan umum.

Kecukupan. Penyesuaian jaringan trayek sudah cukup bagus dan memadai walaupun masih ada kendala-kendala di dalam pelaksanaanya. Adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh supir trayek non izin akhirnya membuat jaringan trayek terhambat. Penerapan jaringan trayek di Kabupaten Jember memberikan kelebihan dan kekurangan baik bagi supir angkutan umum maupun masyarakat. Kelebihan yang dirasakan oleh masyarakat yaitu menggunakan fasilitas umum daerah dengan harga murah karena disesuaikan dengan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember.

Responsivitas. Penyesuaian jaringan trayek mendapat respon yang baik di kalangan masyarakat. Kebijakan ini dapat dikatakan berhasil, karena bisa diterima di lingkungan masyarakat serta memberikan kontribusi yang

besar bagi pihak-pihak terkait seperti masyarakat, supir angkutan umu dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Perataan. penyesuaian jaringan trayek di Kabupaten Jember merata. Hal tersebut dikatakan merata dilihat dari manfaat yang diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat maupun pemerintah daerah. Masyarakat selaku penumpang yang memanfaatkan fasilitas angkutan umum, terpenuhi kebutuhan dan kegiatannya. Bagi supir angkutan umum kebijakan ini juga memberikan efek positif, terutama dalam hal penghasilan ekonomi yang bisa didapatkan harian maupun bulanan.

Ketepatan. Penyesuaian jaringan trayek ini sudah tepat, karena pemerintah sudah menentukan lokasi yang tepat dan merancanganya dengan baik, agar ketidaksesuaian jalur angkutan umum satu berkurang. Berdasarkan pantauan Dinas Perhubungan, lintasan jalur yang dilewati setiap angkutan umum berdasarkan tipe A, B, C, D, karena masing-masing tipe angkutan umum tersebut berbeda jalur. Sejauh ini pihak kami selalu melakukan pengawasan dan sudah lebih baik juga, khususnya sesuai dengan Perbub Nomor 13 Tahun 2013.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan pemahaman peneliti selama melaksanakan penelitian, maka saran dari peneliti sebagai berikut:

Jika dilihat dari segi pelayanan progam kebijakan tersebut masih ada pihak yang menyalahi aturan yang di buat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, pemerintah

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember perlu memberikan sosialisasi kepada sopir angkot atau memberikan bimbingan teknis (BIMTEK) secara rutin agar pelayanan angkutan umum bisa menjadi lebih baik lagi.

V DAFTAR PUSTAKA

Dwit Safari City (2018). Evaluasi Kinerja Operasional dan Pelayanan Terminal Bus Arjosari di Kota Malang

Esti Intari (2017). Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Jumlah Armada Angkutan Kota di Kota Tangerang

Hamidi (2004:82-83). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Pres

<http://uppkhkabjember.blogspot.co.id/2013/07/pendamping-pkh.html> pada tanggal 17 Februari 2019

Miles dan Huberman (1992:15-19). Analisis Data Kualitatif. (diterjemahkan oleh: Tjejep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas

Moleong (2004:280-281). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya; Bandung. 167 hlm

Mudrajad Kuncoro, 2003: 120). Metode Riset unuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga

Nawawi dan Martini (1992:74). Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Nurul Lailiya (2018). Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan Jember

Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2013, Tentang Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017, Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Renstra Dinas Perhubungan Jember 2016-2021

Sriastuti Ayu (2016). Evaluasi Kinerja Pengoperasian Angkutan

Pengumpan (*feeder*) Trans Sarbagita Tp 02 Kota Denpasar Sugiyono (2006:267). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sumariyani (2018). Evaluasi Kinerja Trayek Akdp Terminal Baruga ke berbagai Jurusan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan

William N. Dunn (2002) . Analisis Kebijakan Publik Edisi ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sumariyani (2018). Evaluasi Kinerja Trayek Akdp Terminal Baruga ke berbagai Jurusan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan

William N. Dunn (2002) . Analisis Kebijakan Publik Edisi ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

